

ADA APA DENGAN FAKTOR KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH EKS KARESIDENAN SURAKARTA?

Fatah Nur Salia¹, Puji Wibowo²

¹Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Indonesia

²Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

Email korespondensi: ²puji.wibowo@pknstan.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima:

27 Februari 2022

Direvisi:

12 Juni 2022

Disetujui:

29 Juni 2022

Klasifikasi JEL:

G34, O16

Kata kunci:

Akuntabilitas; kepemimpinan; laporan keuangan pemerintah daerah; politik dinasti; standar akuntansi pemerintah daerah

Keywords:

accountability; government accounting standards; leadership; local government financial statements; political dynasty

Cara mensitasi:

Salia, F. N., & Wibowo, P. (2022). Ada Apa dengan Faktor Kepemimpinan dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta?. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*. 63–88. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i1.4893>



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini adalah para pegawai setiap Badan Keuangan Daerah di wilayah eks-karesidenan Surakarta yang bertugas pada bidang akuntansi, anggaran, perbendaharaan/kas, dan aset. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 7 kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan diperoleh 193 kuesioner yang terisi. Metode analisis data menggunakan partial least square. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah tersebut. Namun, peran auditor internal dan kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan. Variabel gaya kepemimpinan hanya memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penting menempatkan seseorang dengan gaya kepemimpinan tertentu untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

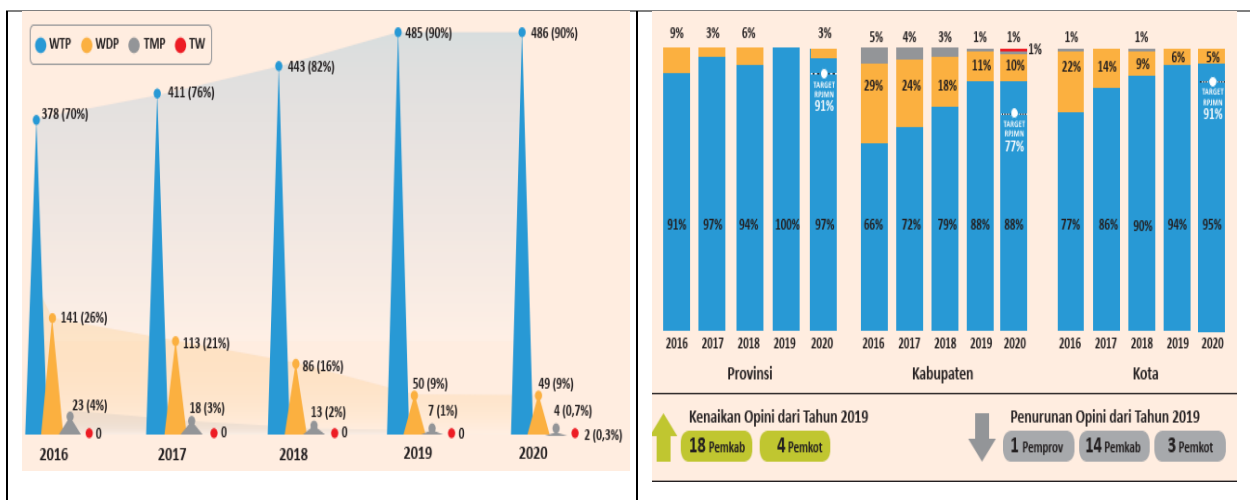
ABSTRACT

This study aims to analyze the determinants of the quality of local government financial reports by considering leadership style as a moderating variable. The sample of this research is the employees of each Regional Finance Agency in the ex-residential area of Surakarta who are in charge of accounting, budgeting, treasury/cash, and assets. Data was collected by distributing questionnaires to employees of the Regional Financial and Asset Management Agency in 7 regencies/cities in the former Surakarta Residency area and 193 completed questionnaires were obtained. The data analysis method used partial least squares. This study shows that the application of accrual-based government accounting standards and the use of technology have a positive effect on the quality of financial reports in the region. However, the role of internal auditors and the competence of human resources do not have a significant impact on the quality of the report. The leadership style variable only strengthens the influence of human resource competence on the quality of financial reports. Thus, it is important to place someone with a certain leadership style to encourage the

improvement of the quality of human resources so as to improve the quality of financial reports.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi, seperti yang tertera pada Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025* mensyaratkan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien. Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban, pemerintah pusat/daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain tujuan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diberikan opini. Pemeriksaan tersebut menilai kesesuaian fakta dan informasi yang tercantum di laporan keuangan dengan standar yang berlaku (Arens dkk., 2014). Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut menjadi wajib (*mandatory*) dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Kualitas kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami menjadi salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Dalam periode 2016-2020. Perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan tren yang membaik sebagaimana tersaji pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Hasil Pemeriksaan LKPD 2016-2020 (BPK, 2021)

Gambar 1 di atas memperlihatkan tren opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selalu meningkat, namun masih terdapat penurunan opini pada 1 pemerintah provinsi, 14 kabupaten, dan 3 kota pada Tahun Anggaran 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan opini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti dokumen kelengkapan pekerjaan dan dokumen pendukung saldo belum memadai dan dugaan penyelewengan prosedur pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah (BPK, 2021). Dalam hal ini pemerintah daerah sejatinya berperan sebagai pemegang kuasa keuangan daerah yang memiliki peran penting dalam mewujudkan fiskal berkesinambungan.

Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah tidak lepas dari proses politik (Anggara, 2013). Salah satu prosesnya ialah pemilihan umum (pemilu). Pada tahun 2020, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar, pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pada pilkada tahun 2020, terdapat fenomena politik dinasti, yakni strategi politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terikat hubungan keluarga (Nagara Institute, 2021).

Politik dinasti merupakan eksekusi negatif dari otonomi daerah yang menimbulkan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh segelintir orang atas hubungan kekeluargaan maupun di luar kekeluargaan untuk melangsungkan kekuasaan (Effendi, 2018).

Salah satu fenomena politik dinasti yang paling dikenal ialah dinasti Ratu Atut di Provinsi Banten. Dinastinya dimulai dari ayahnya, Tubagus Chasan (Gunanto, 2020). Dinasti Ratu Atut terus berlanjut di antaranya, Hikmat Tomet (suami, DPR RI, Golkar), Andika Hazrumy (putra, DPD), Ade Rossi Khaerunisa (menantu, DPRD Kota Serang, Golkar), Ratna Komalasari (ibu tiri, DPRD Kota Serang, Golkar), Heryani (ibu tiri, DPRD Pandeglang, Golkar), Ratu Tatu Chasanah (adik, DPRD Prop. Banten, Golkar), Th. Khaerul Jaman (adik tiri, Wakil Wali Kota Serang), Aden Abdul Cholik (adik ipar, DPRD Prop. Banten, Golkar), dan Airin Rachmi Diany (ipar Gubernur Banten, Walikota Tangerang Selatan) (Prianto, 2016 dan Sukri, 2020). Fenomena dinasti politik juga terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura. Dinasti politik dipimpin oleh RKH. Fuad Amin yang terpilih sebagai Bupati bangkalan periode 2003-2008. Makmun Ibnu Fuad, anak Fuad Amin dicalonkan sebagai anggota DPRD dan sebagai Bupati Bangkalan menggantikan Fuad Amin (Gunanto, 2020). Namun pada tahun 2020, politik kekerabatan oleh dinasti politik hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia (Rahmatunnisa, 2021). Kontestasi politik tahun 2020 diikuti oleh dinasti politik setidaknya oleh 129 orang (17,46%), dengan kemenangan 57 calon (44,19%). Beberapa kerabat tokoh negeri juga turut mencalonkan diri dalam pilkada 2020, di antaranya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, Pilkada Surakarta; Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, Pilkada Medan; dan Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Pilkada Tangerang Selatan (Purba, 2020). Berikut ialah lima besar politik dinasti oleh dinasti politik pada Pilkada 2020.

Tabel 1. Sebaran Daerah Kontestasi Dinasti Politik pada Pilkada 2020

No	Provinsi	Jumlah Calon	Jumlah Daerah	Daerah Kontestasi Dinasti Politik
1	Sulawesi Selatan	13	6	Kota Makassar (5); Kab. Maros; Kab. Pangkajene dan Kepulauan (4); Kab. Soppeng; Kab. Toraja Utara; Kab. Gowa.
2	Jawa Tengah	11	10	Kab. Blora; Kab. Kebumen, Kab. Klaten; Kab. Purbalingga (2 calon); Kab. Rembang; Kab. Semarang; Kota Semarang; Kab. Sukoharjo; Kota Surakarta/Solo; Kota Magelang.
3	Sulawesi Utara	11	7	Kab. Bolaang Mongondow Timur; Kab. Minahasa Selatan; Kab. Minahasa Utara; Kota Bitung (2); Kota Manado; Kota Tomohon; Provinsi Sulut (4).
4	Jawa Timur	8	8	Kab. Banyuwangi; Kab. Blitar; Kab. Kediri; Kab. Pacitan; Kab. Ponorogo; Kab. Sumenep; Kab. Tuban; Kota Blitar.
5	Banten	8	4	Kab. Pandeglang (2 calon); Kab. Serang (2 calon); Kota Cilegon; Kota Tangerang Selatan (3 calon).

Sumber: Riset Dinasti Politik, Nagara Institute, 2020

Dari Tabel 1 dapat diketahui salah satu daerah yang memiliki sebaran dinasti politik terbesar ialah Provinsi Jawa Tengah dengan sebelas calon dari sepuluh daerah berbeda. Hal ini menjadikan Jawa Tengah

berpotensi sebagai salah satu lokasi pusat politik dinasti yang selanjutnya. Menurut Aspinal & Sukmajati (2015), jaringan kekerabatan dapat menjadi daya tarik tersendiri, sebab orang lebih percaya dengan keluarga sendiri dibandingkan dengan orang lain. Tabel 1 menjelaskan wilayah eks-Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah memiliki keunikan tersendiri. Bila dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah eks-Karesidenan Surakarta merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi penghubung di antarprovinsi. Letak geografisnya yang unik menjadikannya sebagai pusat daya tarik (pole of attraction) di jalur penghubung utama antarprovinsi (Prihatini, 2017).

Wilayah esk Karesidenan Surakarta meliputi Kota Solo (Surakarta), Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati (sekarang bernama Kabupaten Sragen), Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Salah satu politik dinasti yang berkembang berada di Kabupaten Klaten. Menurut Pamungkas (2018) dinasti tersebut dimulai oleh Haryanto Wibowo (2000–2005), kemudian digantikan oleh Sunarna (2005–2010, 2010–2015). Diikuti oleh Sri Hartini (istri Haryanto) dan Sri Mulyani (istri Sunarna). Dinasti politik di Kabupaten Klaten bertahan selama 20 tahun oleh dua keluarga (Prabowo, 2020). Di Kabupaten Sukoharjo, pasangan calon Etik Suryani dan Agus Santosa maju pada Pilkada Sukoharjo (Prabowo, 2020). Etik adalah istri Wardoyo Wijaya, Bupati Sukoharjo yang menjabat 10 tahun terakhir, sedangkan Agus saat pilkada dilaksanakan masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (Prabowo, 2020). Di Kota Surakarta, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju pada pilkada. Kota Surakarta menjadi kota yang pernah dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 2005-2012 (Prabowo, 2020). Tabel 1 tidak menyebutkan Kabupaten Sragen, tetapi juga termasuk dalam kabupaten dengan politik dinasti. Hal ini disebabkan, saat penelitian ini ditulis, bupati Sragen, Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang memimpin Sragen selama dua periode, 2016–2021 dan 2021–2026. Sebelumnya Sragen dipimpin oleh ayah dari Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, H. Untung Wiyono yang menjabat dari 2001–2006 dan 2006–2011.

Pencalonan salah satu kerabat pejabat negeri belum tentu memiliki kualifikasi dan kecakapan dalam memimpin daerahnya. Selain itu, politik dinasti berpotensi menutup kesempatan bagi masyarakat yang tidak terafiliasi dengan dinasti politik untuk menjadi pemimpin (Effendi, 2018). Pengisian jabatan strategis dengan kedekatan politik sebagai prasyarat yang akan menghambat kompetisi SDM yang handal (Darmansyah dkk. 2020). Hasil dari politik dinasti ialah penurunan akuntabilitas pemerintah yang dapat dilihat dari opini laporan keuangan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Riharjo dan Anggraini (2017) di 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, S. & Irmawati (2020), politik dinasti memiliki kesempatan untuk memenangkan posisi tertentu dalam pemerintahan, latar belakang politik dan kompetensi individu tersebut tidak semata-merta dapat diremehkan. Jalur politik dinasti hanya memudahkan jalan seseorang dalam mengikuti kontestasi politik, tetapi kemenangan dalam pemilu tetap tergantung pada kemampuan dan keterampilan individu. Bila dilihat dari opini, Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta selama tahun 2012-2019 mendapatkan opini kewajaran seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Opini Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta 2012-2019

Kabupaten/Kota	Opini/Tahun							
	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
Klaten	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Wonogiri	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sukoharjo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sragen	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Karanganyar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah

Kemampuan dan kompetensi individu terlihat jelas pada gaya kepemimpinan yang dipraktikkannya. Keberhasilan atau kegagalan pemimpin dalam budaya organisasi ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan (Nizomi, 2019). Gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika pemimpin mencoba mempengaruhi kinerja individu yang dipimpinya (Rivai & Mulyadi, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk. (2020) dan Triseptya dkk. (2017) yang menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan terbukti efektif memoderasi pengaruh lingkungan kerja dan partisipasi anggaran terhadap kinerja individu dalam bentuk *budget slack*. Di sisi lain, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyetno (2018) dan Widyaningsih (2011) yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan gagal memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja individu dalam bentuk *budget slack*.

Jika dilihat tren perolehan opini WTP yang dimulai sejak tahun 2015, sejalan dengan penggunaan sistem akuntansi akrual pertama kali pada tahun 2015 di Kabupaten Sragen, sebelumnya opini yang diperoleh selalu opini WDP (BPK Perwakilan Jawa Tengah, 2016). Hal tersebut menyiratkan bahwa penggunaan SAP akrual berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan perolehan opini WTP. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabib dkk (2021) dan Yusrianti dkk (2021), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aswar (2020) dan Gamayuni (2018) menemukan hasil bertolak belakang.

Selain memperhatikan kewajiban penerapan basis akrual, pengelolaan keuangan juga harus diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern dan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Peran auditor intern tidak terpisahkan dalam tata kelola sektor publik, sehingga auditor intern memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembangkan proses tata kelola sektor publik. Hal ini serupa dengan yang dikaji oleh Kabib, dkk (2021), Sukarman dan Solovida (2021), dan Anggriawan dan Yudianto (2018). Namun demikian, hasil studi tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dikaji oleh Syarifudin (2014), yaitu peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem informasi pemerintahan kabupaten/kota, termasuk dalam sistem pelaporan. Teknologi informasi digunakan untuk mempermudah penyusunan LKPD, sehingga dapat dilakukan lebih cepat dan efisien (Wineh, 2019). Penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap LKPD telah dilakukan sebelumnya oleh Kabib, dkk (2021), Sukarman dan Solovida (2021), Aswar (2020), Wineh, dkk (2019), Anggriawan dan Yudianto (2018), dan Agustawan dan Rasmini (2016). Selain itu, terdapat penelitian yang

mengungkapkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap LKPD, seperti penelitian oleh Pelamonia (2021) dan Qomah dan Ismunawan (2021).

Sumber daya manusia yang kompeten diperlukan dalam proses akuntansi dan pelaporan. Hal ini serupa dengan yang dikaji dalam penelitian oleh Kabib, dkk (2021), Sukarman dan Solovida (2021), dan Anggriawan dan Yudianto (2018). Namun sumber daya manusia tidaklah terlalu signifikan karena sudah ada teknologi yang bisa mengakomodasi kelemahan manusia seperti yang dijelaskan oleh Lestari dkk. (2021), Aswar (2020), Wineh, dkk (2019), Zulkarnain dan Ningrum (2020), dan Syarifudin (2014).

Sementara itu, terkait dengan peranan kepemimpinan, Agung dan Gayatri (2018) mengungkapkan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Karangasem. Berbeda dengan penelitian tersebut, Triseptya dkk. (2017) meneliti gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi pada pengaruh partisipasi anggaran, komitmen dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial. Studi tersebut menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak memoderasi komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kota Makassar. Gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi juga diteliti oleh Aristiani dan Mimba (2019). Penelitian tersebut meneliti pengaruh *budgetary goal characteristics*, komitmen organisasi, dan motivasi pada kinerja manajerial. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini ialah gaya kepemimpinan transformasional. Penelitian dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi juga dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri oleh Prihartono, et. al. (2018). Variabel independen integritas, objektivitas, kompetensi diuji terhadap efektivitas audit internal. Hasil penelitian mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis tidak memperkuat hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dengan demikian, hasil studi terdahulu mengenai gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan maupun kinerja manajerial belum sepenuhnya konklusif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kualitas laporan dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi, penulis mencoba melihat kembali determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menjadikan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Penelitian dalam politik dinasti masih menjadi hal yang penting didiskusikan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi pemerintahannya. Dampak dinasti politik terhadap kualitas laporan keuangan belum banyak diteliti. Hal ini yang membedakan dengan riset sebelumnya dimana studi terdahulu tidak meneliti dampak dinasti politik terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini menyebar kuesioner pada beberapa kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta yang sangat kental dengan dinasti politik keluarga secara turun temurun. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, peran auditor internal dan kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan. Adapun gaya kepemimpinan ternyata terbukti memperkuat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Studi ini memberikan kontribusi mengenai pentingnya peranan pemimpin dalam menempatkan anak buah sesuai dengan kompetensinya terlepas dari kepentingan politik dinasti.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Stewardship theory meletakkan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pemilik pada manajer. Davis dkk (1997, dalam Routledge, 2017) menjelaskan dalam teori ini manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu namun semata-mata mendahulukan kepentingan pemilik (principal). Dalam konteks akuntansi sektor publik, manajer ialah pemerintah yang bertindak secara kolektif secara sadar dan bijaksana sesuai

dengan kepentingan dan keinginan pemilik masyarakat secara luas (Podrug, 2011 dalam Wardhani & Suhdi, 2020). Proses yang dilakukan oleh manajer adalah memenuhi kebutuhan informasi atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat selaku pemilik. Pemilik menghendaki akuntabilitas manajer dan menuntut manajer untuk selalu memberikan kerja terbaiknya untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada kinerja, seperti yang dijelaskan Muller dan Leconte (2014, dalam Routledge, 2017), *stewardship* pada level tata kelola lebih cocok diterapkan dengan pengendalian atas hasil daripada hanya mengikuti proses.

Teori Kontijensi

Paradigma teori kontingensi adalah efektivitas organisasi dihasilkan dari kesesuaian karakteristik organisasi, seperti struktur organisasi, hingga kontinjensi yang mencerminkan situasi organisasi (Burns and Stalker, 1961; Lawrence and Lorsch, 1967; Pennings, 1992; Woodward, 1965 dalam Donaldson, 2001). Kecocokan antara karakteristik organisasi dengan kontinjensi akan mengakibatkan kinerja tinggi. Oleh sebab itu, organisasi melakukan perubahan pada organisasi sesuai dengan kontijen, dengan mengubah karakteristiknya. Selain kontinjensi dengan struktur organisasi, terdapat juga teori kontinjensi dari karakteristik organisasi yang lain, yaitu kepemimpinan/leadership (Fiedler, 1967), manajemen SDM (Delery dan Doty, 1996), dan proses pengambilan keputusan (Frederickson, 1984). Teori kontinjensi lebih cocok dijabarkan sebagai variabel moderasi atau variabel pengkondisian/conditioning variable (Galtung 1967 dalam Donaldson, 2001).

Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan diungkapkan dalam SAP pada Kerangka Konseptual. Karakteristik yang menjadi prasyarat dalam pelaporan keuangan pemerintah ialah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi dapat dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya koreksi ekspektasi masa lalu sekaligus dapat menjadi prediksi masa depan berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu dan sekarang. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, informasi juga harus tepat waktu dan lengkap. Lengkap berarti tidak ada informasi yang dihilangkan ataupun keliru. Penyajian andal menuntut laporan keuangan untuk bebas dari kesalahan material, dapat diuji kebenarannya, dan tidak berpihak pada pengguna tertentu. Laporan keuangan yang disusun harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu, maupun dengan entitas lain. Hal ini mengisyaratkan penyusunan yang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Penyajian laporan keuangan harus sejelas mungkin sesuai istilah yang ada pada batas pemahaman pengguna

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan dan tindakan mempengaruhi seseorang melalui komunikasi untuk menimbulkan inspirasi dan semangat dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu, biasanya tujuan organisasi/kelompok (Basalamah, 2020). Pemimpin berbeda dengan manajer karena pemimpin memfokuskan diri pada orang, sedangkan manajer memfokuskan diri pada sistem.

Hemphill & Coons (1957) menjelaskan kepemimpinan sebagai perilaku individu mengatur kelompoknya menuju tujuan bersama. Sedangkan Richards & Engle (1986) memberikan penjelasan bahwa kepemimpinan adalah proses artikulasi visi, pewujudan nilai-nilai, dan menciptakan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan. Schein (1992) menunjukkan kepemimpinan adalah proses revolusioner sehingga menjadi adaptif. Yukl & Gardner (1971) menjelaskan kepemimpinan yang telah dijelaskan oleh para ahli

tergantung dari asumsi subjek yang memegang kendali, subjek yang dikendalikan untuk dipimpin, diatur, dan difasilitasi dalam suatu kelompok.

Menurut Clegg dkk., (2021), kepemimpinan terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan situasional dan pendekatan kontijensi. Pendekatan situasional dikembangkan oleh Hersey dkk., (1996), sedangkan pendekatan kontijensi dikembangkan dengan *path-goal theory* oleh House (1971). Penelitian ini menggunakan teori kontijensi sebab teori kepemimpinan lebih condong pada konteks kepemimpinan, seperti sifat pekerjaan, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial ekonomi (Clegg dkk., 2021). Teori kontijensi didasarkan pada penilaian pemimpin terhadap yang diperlukan oleh orang yang dipimpinnya dan sifat dari hal yang dikerjakannya (Allison & Messick, 2014). Pemimpin bergerak sebagai fasilitator yang memberikan informasi, dukungan, dan sumber daya berdasarkan penilaiannya (Clegg dkk., 2021).

Yukl (2013) menyatakan ada tiga belas teori kontijensi, salah satunya *path-goal theory*. Teori tersebut dikembangkan oleh House (1971, dalam Yanuarti & W, 2014), menyatakan bahwa pemimpin dapat menunjukkan beberapa gaya kepemimpinan. Teori ini mencerminkan upaya pemimpin dalam menentukan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja orang-orang yang dipimpinnya. Penelitian ini menggunakan gaya kepemimpinan yang diidentifikasi oleh House, yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, pengasuh, direktif, suportif, dan orientasi prestasi.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang akan dilakukan menguji faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruar, peran auditor internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Penelitian ini menguji hubungan tersebut dengan dimoderasi oleh faktor gaya kepemimpinan. Beberapa studi terdahulu memperlihatkan adanya keberagaman hasil terkait determinan kualitas laporan keuangan. Berikut ikhtisar hasil penelitian dimaksud.

Tabel 3. Ikhtisar Studi Terdahulu

No.	Penulis	Tahun	Variabel			
			Penerapan SAP berbasis Akruaal	Peran Auditor Internal	Kompetensi SDM	Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.	Kabib, dkk	2021	PS	PS	PS	
2.	Sukarman dan Solovida	2021		PS		PS
3.	Lestari dkk.	2021		PS	TS	PS
4.	Pelamonia	2021			PS	TS
5.	Qomah dan Ismunawan	2021	PS			TS
6.	Aswar	2020	TS			PS
7.	Zulkarnain, et. al.	2020	PS		TS	
8.	Syarifudin	2020		TS	TS	
9.	Wineh, dkk	2019	PS		TS	PS
10.	Anggriawan dan Yudianto	2018	PS	PS	PS	PS
11.	Gamayuni	2018	TS	PS		
12.	Agustiawan dan Rasmini	2016	PS		PS	PS

*PS = positif signifikan, TS=tidak signifikan

Sumber: Data hasil penelitian (2021)

Penerapan SAP Akruaal dan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang telah disajikan dengan basis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010, menyiratkan kualitas laporan keuangan konsisten dengan yang disyaratkan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabib, dkk (2021), Qomah dan Ismunawan (2021), Agustiawan dan Rasmini (2016), Wineh, dkk (2019), Anggriawan dan Yudianto (2018), bahwa penerapan SAP berbasis akrual memiliki peran signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berkebalikan dengan penelitian oleh Aswar (2020). Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H₁: Penerapan SAP berbasis Akruaal berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta

Auditor Internal dan Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan. APIP berperan dalam memastikan SPI efektif. APIP pada tingkat kabupaten ialah Inspektorat Kabupaten. Salah satu peran penting yang dijalankan oleh inspektorat adalah memberikan jasa asurans, seperti audit dan reuiu, dan memberikan keyakinan memadai atas sistem pengendalian intern yang diimplementasikan di SKPD sudah layak dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Menurut Kabib, dkk

(2021), Sukarman dan Solovida (2021), Lestari dkk. (2021), dan Anggriawan dan Yudianto (2018) peran auditor internal terlihat saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Peran auditor internal yang dimaksud ialah konsultasi selama penyusunan dan reviu laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Peran auditor internal berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta

Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi SDM ditentukan oleh dua kemampuan yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Stephen Robbins, 2007 dalam (Alam, 2016) Pembuatan laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya agar dapat memenuhi standar yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabib, dkk (2021), Agustiawan dan Rasmini (2016), dan Anggriawan dan Yudianto (2018). Hasil penelitian tersebut berkebalikan dengan Wineh, dkk (2019), sumber daya manusia dianggap memiliki batasan-batasan seperti pengetahuan dasar dan ketrampilan, namun tetap dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2010. Dari uraian tersebut, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut.

H₃: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta

Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan

Pelaksanaan e-government telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah daerah menerapkan teknologi informasi secara konsisten dan bertahap untuk menunjang proses pemerintahan, tidak terkecuali proses akuntansi dan pemerintahan. Hal ini dimungkinkan sebab teknologi informasi mempermudah proses pertukaran informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi ditujukan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi antarinstansi. Hal tersebut akan meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan pemerintahan, yang merupakan tujuan dari proses pemerintahan. Hal ini serupa dengan yang dikaji dalam penelitian oleh Kabib, dkk (2021), Sukarman dan Solovida (2021), dan Anggriawan dan Yudianto (2018). Namun sumber daya manusia tidaklah terlalu signifikan karena sudah ada teknologi yang bisa mengakomodasi kelemahan manusia seperti yang dijelaskan oleh Lestari dkk. (2021), Aswar (2020), Wineh, dkk (2019), Zulkarnain dan Ningrum (2020), dan Syarifudin (2014). Dari uraian tersebut, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut.

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta

Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh SAP Akrua

Kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang dalam dunia kerja akan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Gaya kepemimpinan yang berbeda-beda akan memiliki efek yang berbeda pula karena kontijen dengan penilaian pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya, sifat pekerjaan, dan lingkungan kerjanya (Clegg dkk., 2005). Lingkungan sosial esk Karesidenan Surakarta yang berada di antara provinsi DIY dan provinsi Jawa Timur menyebabkan keanekaragaman budaya yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam lingkungan kerja pemerintahan. Sifat dari proses akuntansi dan pelaporan tentu saja akan mempengaruhi penilaian pemimpin, dan penilaian pemimpin akan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinannya. Penerapan SAP berbasis akrua menjadi tujuan dari organisasi sebab hal tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang nantinya

diharapkan akan mendapatkan opini WTP dari BPK. Selain sifat dari proses akuntansi dan pelaporan yang berbasis akrual, peran pemimpin dalam memberikan dorongan dan pengaruh kepada pegawai akan mempengaruhi motivasi pegawai dalam penerapan SAP berbasis akrual. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₅: Kepemimpinan memoderasi pengaruh positif Penggunaan SAP berbasis Akrual terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta.

Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh Auditor Internal

Auditor internal berada di wilayah kontrol dari pemimpin. Auditor internal sebagai konsultan memiliki peran untuk memberikan jasa konsultasi dan bimbingan terhadap pegawai di suatu instansi. Sebab ada pemimpin di organisasi tersebut, auditor internal juga akan mengalami hal yang sama dengan pegawai instansi tersebut, yaitu pengaruh dari pemimpin. Pemimpin menghendaki proses akuntansi dan pelaporan keuangannya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga instansinya akan memperoleh opini kewajaran yang memadai. Auditor internal selain karena dorongan peran, juga memiliki motivasi pemimpin. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₆: Kepemimpinan memoderasi pengaruh positif peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta.

Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh Kompetensi SDM

Pegawai dibina akan dimotivasi dan didorong dengan gaya kepemimpinan tersebut untuk mencapai suatu tujuan organisasi, dalam hal ini pelaporan keuangan yang memadai. Proses pencapaian tujuan tersebut menuntut individu-individu yang dipimpin menjadi lebih kompeten, karena pemimpin adalah fasilitator, mulai dari sumber daya, informasi, dan dukungan (Clegg dkk., 2021). Bila kompetensi pegawai meningkat, pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan efektif dan efisien.

Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

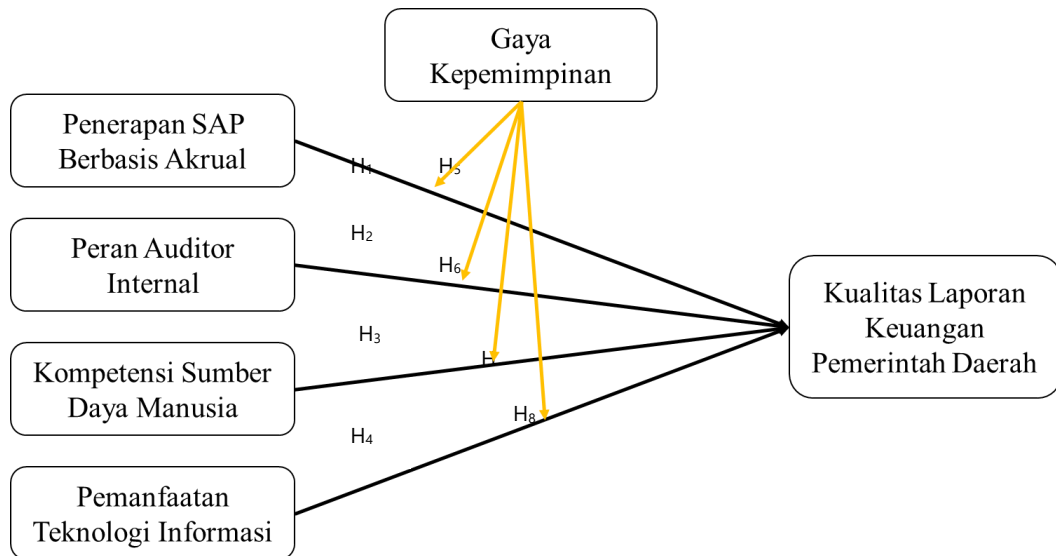
H₇: Kepemimpinan memoderasi pengaruh positif kompetensi SDM terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta.

Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh Teknologi Informasi

Pemerintah telah memberdayakan teknologi informasi dalam menjalankan tata kelola dan proses bisnisnya seperti yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Teknologi ini merupakan sumber daya yang disediakan oleh pemimpin dalam memandu para pegawainya. Dapat disimpulkan gaya kepemimpinan kontijen terhadap proses bisnis dan kemampuan pegawai yang dipimpinya. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₈: Kepemimpinan memoderasi pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta.

Gambar berikut ini menyajikan ikhtisar kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai setiap Badan Keuangan Daerah yang ada di wilayah eks- Karesidenan Surakarta. Dalam penelitian ini, sampel diambil secara purposive, dengan kriteria ASN Badan Keuangan Daerah se-eks Karesidenan Surakarta pada bidang akuntansi, anggaran, perbendaharaan/kas, dan aset.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan persepsi mereka terhadap variabel KLK, SAP, AI, SDM, TI dan LEAD di instansi tempat mereka bekerja. Data penelitian ini didapatkan dengan kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan skala likert enam tanggapan bertingkat, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), agak setuju (AS), agak tidak setuju (ATS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Skala tersebut kemudian diberi bobot masing-masing 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 (Jupp, 2006).

Penelitian ini memodifikasi skala likert yang akan digunakan. Modifikasi tersebut dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih reliabel dan valid dengan mengurangi distorsi jawaban, terutama saat mengukur persepsi responden. Sebab responden akan merepresentasikan SKPD tempat ia bekerja, jawaban yang diberikan mungkin akan terdistorsi supaya terlihat baik dan tekanan untuk mendapat skor baik meningkat (Lottridge dkk., 2013). Hal ini akan menyebabkan responden mendistorsi jawaban dan enggan memilih jawaban yang cenderung ekstrem, seperti sangat setuju, dan sangat tidak setuju dan cenderung memilih jawaban ragu-ragu atau netral, bermain aman "*play it safe*" (Myford & Wolfe, 2009 dalam Lottridge dkk., 2013). Hal ini disebut sebagai central tendency bias yaitu saat jawaban yang diberikan oleh responden mengelompok pada jawaban tengah (Saal dkk.'s (1980, dalam M.Lottridge dkk., 2013). Jika central tendency bias tidak dapat diakomodasi, data menjadi kurang signifikan, karena hasilnya akan mendekati rata-rata kelompok (Humboldt, 2016).

Tabel 4. Skor Jawaban Kuesioner

No.	Kode	Penjelasan	Skor	
			Pernyataan Positif	Pernyataan Negatif
1.	SS	sangat setuju	6	1
2.	S	setuju	5	2
3.	AS	agak setuju	4	3
4.	ATS	agak tidak setuju	3	4
5.	TS	tidak setuju	2	5
6.	STS	sangat tidak setuju	1	6

Sumber: Data diolah (2021)

Variabel dependen yang hendak diteliti ialah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, indikator kualitas LKPD adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sudrianti (2015) dengan 13 pertanyaan yang mewakili keempat indikator tersebut.

Variabel independen yang dikaji ialah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, peran auditor internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Penerapan SAP berbasis akrual bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi ketentuan yang ada pada standar akuntansi pemerintahan seperti yang tertera pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen dari standar tersebut yang dikembangkan oleh Sudrianti (2015) dengan 10 pertanyaan yang dimodifikasi.

Auditor internal memiliki peran sebagai pengawas, katalisator, konsultan, dan penjamin mutu. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Nugraheni dan Mustikawati (2016) serta Torar (2018) yang dimodifikasi menjadi 24 pertanyaan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan gabungan dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang berhubungan dengan kinerja dan perilaku dari kinerja seseorang (Kandula, 2013). Pada penelitian ini, variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sudrianti (2015) dengan 14 pertanyaan.

Teknologi sudah menjadi bagian kehidupan tidak terkecuali dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan membuat proses akuntansi menjadi lebih efisien. Pada penelitian ini, variabel diukur dengan menggunakan pertanyaan yang dimodifikasi dari instrumen yang dikembangkan oleh Desmiyati (2014) dan Sudrianti (2015) dengan 8 pertanyaan.

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi untuk menguji pengaruh variabel independen dengan variabel dependen (Saunders dkk., 2016). Penelitian ini mengkaji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang dimoderasi oleh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan melalui proses yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh House (1971) dalam Yanuarti (2014) dengan 12 pertanyaan.

Tabel 5. Ikhtisar Indikator Variabel Konstruk

Variabel	Indikator	Sumber
KLK	Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami	PP 71 Tahun 2010; Sudrianti (2015)
SAP	Pelaporan keuangan, pemanfaatan informasi akrual	PP 71 Tahun 2010; Sudrianti (2015)
AI	Pengawas, konsultan, katalisator	Any F.P. (2016); Brifana S.N. dan Indah M. (2016); Torar (2018)
SDM	Pengetahuan, keterampilan, perilaku	Sudrianti (2015)
TI	Teknologi, jaringan	Desmiyati (2014); Sudrianti (2015)
LEAD	Partisipatif, direktif, suportif, orientasi prestasi	House (1971) dalam Yanuarti (2014)

Berdasarkan hipotesis yang dibangun serta variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya maka model penelitian ini dinyatakan sebagai berikut dengan mengacu pada Ghozali (2012).

$$KLK_i = \alpha + \beta_1 SAP_i + \beta_2 AI_i + \beta_3 SDM_i + \beta_4 TI_i + \beta_5 SAP \times LEAD_i + \beta_6 AI \times LEAD_i + \beta_7 SDM \times LEAD_i + \beta_8 TI \times LEAD_i + \epsilon_i$$

Keterangan

α	:	konstanta
β_{1-8}	:	koefisien variabel independen
ϵ	:	eror sistemik
KLK	:	Kualitas laporan keuangan
SAP	:	Penerapan SAP berbasis akrual
AI	:	Peran auditor internal
SDM	:	Kompetensi SDM
TI	:	Penggunaan teknologi informasi
SAPxLEAD	:	Penerapan SAP berbasis akrual dimoderasi gaya kepemimpinan
AixLEAD	:	Peran auditor internal dimoderasi gaya kepemimpinan
SDMxLEAD	:	Kompetensi SDM dimoderasi gaya kepemimpinan
TixLEAD	:	Penggunaan teknologi informasi dimoderasi gaya kepemimpinan

Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji model persamaan struktural, dan uji hipotesis. Analisis statistika deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan penyajian yang ringkas sehingga lebih mudah dipahami (Muchson, 2017). Model penelitian diuji dengan model pengukuran (*measurement models/outer models*) dan model struktural (*structural models/inner models*). Outer model menjelaskan hubungan antara indikator dengan variabel laten. Inner model merinci hubungan antarvariabel laten, yaitu antara variabel dependen dan variabel independen, serta variabel moderasi. Untuk melakukan pengujian tersebut, data diolah dengan *software* SmartPLS 3.3.3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk fisik dan dengan menggunakan tautan *Google-forms*. Kuesioner ditujukan kepada pegawai bidang akuntansi, anggaran, perbendaharaan, dan aset di Badan Keuangan Daerah di tujuh kabupaten/kota yang ada di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Berikut ini jumlah kuesioner yang disebar selama penelitian berlangsung.

Tabel 6. Distribusi dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	261	100,00%
Kuesioner yang tidak dikembalikan	68	26,05%
Kuesioner yang dikembalikan	193	73,93%
Kuesioner yang dapat diolah	193	73,95%

Jumlah kuesioner yang disebar berdasarkan Tabel 6 ialah 261 eksemplar, gabungan antara kuesioner fisik dan tautan *Google-forms*. Tabel 6 juga menginformasikan terdapat 68 eksemplar kuesioner yang tidak dikembalikan, sehingga hanya 193 eksemplar saja yang dikembalikan dengan tingkat pengembalian 73,93%. Dari kuesioner yang dikembalikan, seluruhnya diisi dengan lengkap oleh responden, sehingga sebanyak 193 eksemplar kuesioner (73,95%) dapat diolah dalam penelitian ini. Hasil pengujian statistik deskriptif termuat dalam Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	KLK	SAP	AI	SDM	TI	LEAD
N	193	193	193	193	193	193
Minimum	2	1	1	1	3	1
Maximum	6	6	6	6	6	6
Range	4	5	5	5	3	5
Median	5	5	5	5	5	5
Mode	5	5	5	5	6	5
Mean	5.34	5.04	5.00	5.04	5.33	5.19
Standard Deviation	0.65	0.94	0.91	0.78	0.68	0.81
	06	17	94	74	78	34

Berdasarkan Tabel 7, seluruh variabel memiliki skor maksimal 6 dan skor median 5. Seluruh variabel juga memiliki rata-rata yang konsisten di angka 5 dan mendekati median dari variabel, bernilai 5. Variabel kualitas laporan keuangan, penerapan SAP berbasis akrual, peran auditor internal, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan secara keseluruhan telah dinilai baik oleh responden, sehingga variabel tersebut sudah baik dan dapat menggambarkan variabel secara keseluruhan.

Uji Validitas

Uji validitas ialah untuk mengukur korelasi antara indikator yang mewakili variabel dengan konstruk variabel sehingga benar-benar mewakili konstruk laten (Hair, et.al., 2019). Uji validitas konvergen dapat dilakukan dengan uji *factor loadings* dan dianalisis dengan nilai *average variance extracted* (AVE). Hasil dari prosedur tersebut dapat diamati pada gambar di lampiran. Apabila *factor loadings* memiliki nilai 0,7, indikator dapat dijadikan ukuran parameter yang valid dalam mengukur variabel laten (Hulland, 1999 dalam Kwong & Wong, 2019).

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen yang ditunjukkan *factor loadings* dapat diamati bahwa terdapat indikator-indikator yang tidak valid sebab bernilai kurang dari 0,7 dan harus dihapus. Setelah dilakukan reduksi atas indikator-indikator tersebut, uji *PLS Algorithm* dilakukan kembali. Hasil uji *factor loadings* serta validitas dari tiap indikator dapat dilihat pada Tabel 8. Beberapa variabel pada Tabel 8 yang memiliki *factor loadings* kurang dari 0,7 dan di atas 0,6 masih dapat dianggap valid (Ghazali, 2008).

Tabel 8. Ikhtisar Jumlah Indikator

No	Variabel	Jumlah Indikator		
		Sebelum Reduksi	Dihapus	Setelah Reduksi
1	Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	13	8	5
2	Penerapan SAP Berbasis Akrua (SAP)	10	6	4
3	Peran Auditor Internal (AI)	24	18	6
4	Kompetensi SDM (SDM)	14	10	4
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)	8	3	5
6	Gaya Kepemimpinan (LEAD)	12	8	4
	Total	81	53	28

Sumber: Diolah oleh Penulis dari SmartPLS

Selain nilai *factor loadings*, validitas konvergen juga dapat ditentukan melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE). AVE menjelaskan sejauh mana konstruk laten menjelaskan varians indikator-indikatornya (Hair, et.al., 2019). Nilai AVE paling tinggi ialah AVE pada moderasi Gaya Kepemimpinan (LEAD) terhadap variabel SAP, AI, SDM, dan TI. Nilai AVE tertinggi untuk variabel tanpa moderasi ialah variabel Peran Auditor Internal (AI) dengan nilai 0,631, yang berarti variabel AI dapat menjelaskan 63,1% dari variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Selain dari 63,1% tersebut tidak dapat dijelaskan oleh variabel dan merupakan *error*.

Seluruh variabel independen lainnya seperti Penerapan SAP Berbasis Akrua (SAP), Kompetensi SDM (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Gaya Kepemimpinan (LEAD) memiliki nilai AVE lebih dari 0,5 yang bermakna masing-masing variabel dapat menjelaskan lebih dari 50% variabel Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE lebih dari 0,5, sehingga dapat menjelaskan setidaknya 50% dari variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Dapat disimpulkan model penelitian lolos uji *factor loadings* dan AVE.

Selanjutnya, validitas indikator diuji pula melalui pengujian *discriminant validity* yang mengukur sejauh mana konstruk berbeda dengan konstruk lain dalam model struktural. Validitas ini diukur dengan menguji korelasi antarkonstruk yang kemudian dibandingkan dengan korelasi indikator dengan satu konstruk (Hair, et.al., 2019).

Discriminant validity membandingkan varians dalam konstruk dengan varians antarkonstruk. Varians dalam konstruk harus lebih besar daripada varians antarkonstruk, sebab suatu konstruk harus

lebih banyak menjelaskan varians dalam indikator-indikatornya daripada yang dijelaskan oleh konstruk lain (Hair, et.al., 2019). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa varians dalam konstruk merupakan angka tertinggi dari masing-masing kolom maupun baris tabel *Fornell Larcker*. Varians dalam konstruk teruji lebih tinggi daripada varians antarkonstruk. Oleh karena itu, model penelitian lolos uji *Fornell Larcker*.

Uji validitas diskriminan selanjutnya ialah uji *cross loading* yang menguji reliabilitas model dengan membandingkan antara *factor loadings* indikator dengan seluruh konstruk. *Factor loadings* untuk indikator suatu konstruk harus lebih tinggi daripada *factor loadings* suatu indikator dengan konstruk lain. Indikator harus lebih menjelaskan konstraknya daripada menjelaskan konstruk lain. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa angka *factor loadings* untuk indikator dengan konstruk variabel tersebut lebih tinggi daripada *factor loadings* untuk indikator dengan konstruk variabel lainnya sehingga lolos uji *cross loading*.

Uji Reliabilitas

Berikut ialah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan prosedur PLS Algorithm.

Tabel 9. Uji Reliabilitas

<i>Item</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>
KLK	0,762	0,764	0,840
SAP	0,699	0,707	0,815
AI	0,883	0,894	0,911
SDM	0,686	0,694	0,808
TI	0,769	0,780	0,844
LEAD	0,766	0,771	0,850
SAP X LEAD	1,000	1,000	1,000
AI X LEAD	1,000	1,000	1,000
SDM X LEAD	1,000	1,000	1,000
TI X LEAD	1,000	1,000	1,000

Angka Cronbach's Alpha variabel SAP dan SDM berada di bawah 0,7 namun tidak memiliki selisih yang besar sehingga dapat diterima. Selain itu, angka AVE berada di atas 0,5, yang bermakna bahwa indikator variabel tersebut dapat menjelaskan lebih dari 0,5 variabel dependen. Meskipun Cronbach's Alpha dapat dijadikan ukuran reliabilitas suatu indikator, Cronbach's Alpha tidak menimbang indikator secara individu (Hair, et.al., 2019). *Composite reliability* dapat mengatasi hal tersebut. Tabel 9 menyajikan

angka composite reliability untuk seluruh variabel lebih dari 0,7. Dari hasil uji reliabilitas, model penelitian lolos uji reliabilitas.

Uji Model Struktural

Uji model struktural terdiri dari uji koefisien determinasi (*R-squared*) dan uji analisis jalur (*path analysis*). Model struktural pada PLS dievaluasi melalui penggunaan R-square variabel dependen dan nilai koefisien jalur masing-masing variabel independen. Penelitian ini menghasilkan *adjusted R-squared* sebesar 57,7%, yang berarti variasi kualitas laporan keuangan dijelaskan oleh variabel independen variabel sebanyak 57,7%. Sisa dari model tersebut, 42,3% merupakan *measurement error*, faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disebabkan oleh variabel selain variabel SAP, AI, SDM, dan TI.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan prosedur *bootstrapping* untuk mendapatkan angka T- statistics dan P value, sedangkan angka *path coefficient* didapatkan dari prosedur yang telah dilakukan sebelumnya. Hipotesis diterima jika T-statistics lebih dari 1,96 dengan level signifikansi 5%, atau angka P value 0,05 (Hair, et. al., 2019). Hasil uji hipotesis dapat diamati melalui Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Ikhtisar Hasil Uji Hipotesis

Variabel eksogen	Variabel endogen	Path coefficient	T stat	P value	Kesimpulan
SAP	KLK	0,236	2,754	0,003	Diterima
AI	KLK	0,030	0,518	0,302	Ditolak
SDM	KLK	0,122	1,478	0,07	Ditolak
TI	KLK	0,310	4,103	0,000	Diterima
SAP x LEAD	KLK	0,032	0,397	0,346	Ditolak
AI x LEAD	KLK	-0,076	1,344	0,09	Ditolak
SDM x LEAD	KLK	0,188	2,811	0,003	Diterima
TI x LEAD	KLK	-0,089	0,993	0161	Ditolak
LEAD	KLK	0,199	2,719	0,003	Diterima

Sumber: Diolah oleh Penulis dengan SmartPLS

Determinan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh latar belakang pendidikan responden akuntansi hanya 29,7%. Walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman bekerja responden sudah mumpuni dan lebih dari 15 tahun (47,15%). Hal ini membuahakan pemahaman SAP berbasis akrual yang baik pada responden meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori *stewardship*. Penerapan SAP berbasis akrual telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, meskipun pemanfaatan informasi akrual masih belum maksimal untuk perencanaan anggaran SKPD. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabib, dkk (2021) yang menyatakan pemerintah yang menggunakan basis akrual dari siklus akuntansinya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Agustiawan dan Rasmini (2016), Wineh, dkk (2019), dan Anggriawan dan Yudianto (2018) juga menyimpulkan hal yang selaras. Implementasi SAP berbasis akrual membuat informasi yang disajikan

menjadi lebih transparan dan detail. Berbeda dengan Aswar (2020), hasil penelitiannya menunjukkan implementasi SAP berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD lantaran adanya perbedaan perlakuan akuntansi tiap periode.

Hasil uji hipotesis menunjukkan peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Inspektorat Kabupaten, sebagai pengawas/*watchdog*, mengawasi kinerja pegawai dan mengawasi ketaatan instansi mengenai tata kelola pemerintah yang baik. Sebagai konsultan, inspektorat berkonsultasi dengan pihak SKPD mengenai standar operasional, terutama yang berkaitan dengan penataan serta pembuatan dokumen yang baik dan benar. Masih terdapat peran auditor internal sebagai katalisator, namun tidak terdapat dalam indikator yang valid. Hal tersebut dapat disebabkan oleh luasnya cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor; jumlah auditor muda yang lebih banyak daripada auditor senior, sehingga pengalaman auditor tersebut belum mumpuni; dan koordinasi yang tidak seimbang antara SKPD dengan inspektorat kabupaten/kota.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut tidak konsisten dengan teori *stewardship*. Peran katalisator belum menjadi hal yang utama. Penting bagi SKPD untuk mengevaluasi kembali laporan keuangan yang telah direviu, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi kualitas laporan keuangan. Motivasi untuk meningkatkan kinerja SKPD belum terlihat sebagaimana peran auditor internal sebagai katalisator tidak valid. Syarifudin (2014) mengisyaratkan hal serupa pada penelitiannya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah auditor internal, namun cakupan pemeriksaan sangat luas. Batasan biaya dan waktu serta koordinasi antara auditor dengan SKPD menjadi penghambat dalam menjalankan perannya. Hasil penelitian berbeda disimpulkan oleh Kabib, dkk (2021), Sukarman dan Solovida (2021), Lestari dkk. (2021), yaitu auditor internal sebagai tameng pertama dalam mencegah kesalahan dan kecurangan.

Hasil uji hipotesis menunjukkan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Responden telah memahami tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas yang baik serta memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang baik. Indikator yang belum valid ialah kompetensi SDM tentang keahlian yang dimilikinya. Responden tidak merasa yakin dengan keahliannya, meskipun memiliki pengetahuan yang mumpuni yang terlihat dari mayoritas responden berlatar belakang akuntansi, manajemen, dan ekonomi. Hal tersebut juga dirasakan oleh pegawai yang tidak berlatar belakang akuntansi meskipun sudah bekerja selama lebih dari 15 tahun. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan mengenai proses akuntansi dan pelaporan di SKPD.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut tidak konsisten dengan teori *stewardship*. Masing-masing pegawai memiliki pendidikan yang berbeda. Manajer pada SKPD hanya mengandalkan pengalaman kerja. Perlu diketahui peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keahlian akan meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2021), Zulkarnain dan Ningrum (2020), Syarifudin (2014), Wineh, dkk (2019). Pelatihan akuntansi dan pelaporan tidak diselenggarakan dengan baik menjadi penyebab utama. Selain itu, indikator untuk mengukur kompetensi SDM belum tepat. Tidak sama dengan penelitian tersebut, Kabib, dkk (2021) mengungkapkan SDM yang diberdayakan dengan baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Agustawan dan Rasmini (2016) juga menjabarkan SDM yang kompeten mampu mengimplementasikan teknologi informasi dalam akuntansi berbasis akrual dan mampu bertindak dalam kerangka sistem pengendalian intern yang tepat.

Hasil uji hipotesis menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Indikator variabel TI yang valid ialah indikator komputer dan jaringan. Komputer telah tersedia dan digunakan untuk melaksanakan tugas. Komputer tersebut digunakan untuk mengakses aplikasi pengolahan data transaksi keuangan yang sesuai dengan peraturan, sehingga laporan keuangan yang disusun di SKPD dapat dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi. Jaringan internet telah tersedia di SKPD tempat responden bekerja dan telah

dimanfaatkan sebagai konektor dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. Teknologi informasi yang tersedia sudah selayaknya dimanfaatkan untuk kepentingan SKPD, termasuk proses akuntansi dan pelaporan. Bila kompetensi SDM yang tidak berhubungan dengan akuntansi dapat mengoperasikan teknologi dengan baik, teknologi informasi dapat mengakomodasi kekurangan yang dimiliki oleh SDM tersebut. Selain itu, teknologi yang dirancang tentunya mudah digunakan (*user-friendly*) yang dapat diamati melalui tampilan antarmuka (*interface*) yang rapi, struktur jelas, dan navigasi sederhana. Meskipun SDM masih belum melek teknologi, orang tersebut masih dapat mengoperasikannya dengan mudah.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut konsisten dengan teori *stewardship*. Manajer menggunakan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Komputer dan jaringan yang tersedia di SKPD dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan pegawai di SKPD dan digunakan untuk otomatisasi proses serta sebagai penghubung data antarkomputer. Hal tersebut akan mempercepat proses akuntansi dan pelaporan di SKPD. Bila proses tidak terhambat, laporan keuangan akan selesai tepat waktu. Informasi dalam laporan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Aswar (2020) menjelaskan pemanfaatan teknologi dapat mengatasi keterbatasan kemampuan manusia. Anggriawan dan Yudianto (2018) dan Wineh, dkk (2019) juga menjelaskan teknologi informasi dapat mengurangi konstrain biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Namun, teknologi masih tetap harus dipegang oleh SDM yang mumpuni. Tanpa SDM, teknologi informasi tidak akan berdaya guna, seperti yang dikemukakan oleh Zulkarnain dan Ningrum (2020).

Pengaruh Moderasi Gaya Kepemimpinan

Hasil uji hipotesis mengemukakan gaya kepemimpinan (LEAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Seorang pemimpin mau membantu dan memberikan jalan keluar dan menjadikan suatu keputusan SKPD serta mau menerima dan memperhatikan masukan dan informasi dari bawahan untuk menyusun tugas kerja. Oleh sebab itu, responden merasa dirinya dianggap dalam suatu SKPD. Responden merasa pemimpin menjadi sokongan terakhir dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini disebabkan karena pemimpin selalu berupaya merumuskan jalan keluar tanpa menyudutkan bawahannya. Hasil penelitian dan pembahasan tersebut konsisten dengan teori *stewardship*, manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu namun semata-mata mendahulukan kepentingan pemilik (*principal*). Pemimpin merupakan manajer di instansinya. Pemimpin membimbing, mengarahkan, serta memotivasi bawahannya untuk melaksanakan tugas sesuai yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan instansi. Pemimpin SKPD membantu pegawai-pegawai untuk menyelesaikan masalah terkait pekerjaan sekaligus mengawasinya.

Hasil uji hipotesis menunjukkan interaksi variabel SAPxLEAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel SAP memiliki dampak signifikan pada kualitas laporan keuangan (KLK), sedangkan interaksi variabel SAPxLEAD tidak memiliki dampak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh PP 71 Tahun 2010 yang sifatnya adalah wajib (*mandatory*). Penerapan SAP berbasis akrual sudah diwajibkan paling lambat tahun 2015. Oleh karena itu, mau tidak mau pegawai mengikuti peraturan tersebut. Ada tidaknya pemimpin bukan menjadi hal yang utama dalam penerapan SAP berbasis akrual. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual dengan atau tanpa interaksi pemimpin dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang sama.

Hasil studi dan analisis tersebut tidak konsisten dengan teori *stewardship*. Diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Penerapan SAP berbasis akrual menjadi basis akuntansi dan pelaporan di SKPD yang diharapkan masyarakat menjadi pertanggung jawaban dari SKPD. Hasil ini juga tidak sesuai dengan teori kontijensi, sebab keberhasilan organisasi kontijen dengan

kondisi/gaya kepemimpinannya. Variabel gaya kepemimpinan tidak mampu menjadi penguat penerapan SAP berbasis akrual, sebab hal tersebut sudah menjadi hal yang wajib/mandatory ada atau tidak ada variabel pengkondisi.

Hasil uji hipotesis menunjukkan interaksi AlxLEAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel AI maupun interaksi variabel SAP x LEAD sama-sama tidak memiliki dampak signifikan pada kualitas laporan keuangan (KLK). Hal ini tampaknya disebabkan oleh koordinasi yang tidak dilakukan dengan intens antara inspektorat dengan pemimpin SKPD. Inspektorat kabupaten/kota juga bertugas untuk mengawal tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap SKPD. Apabila rekomendasi yang diberikan inspektorat tidak ditindak lanjuti oleh pimpinan SKPD dan tidak diinstruksikan kepada bawahannya, kemungkinan rekomendasi ditindak lanjuti oleh SKPD sangat kecil. Dengan demikian, dengan adanya pemimpin, peran auditor internal tidak berpengaruh pada laporan keuangan yang disusun oleh SKPD.

Hasil riset dan analisis tersebut tidak konsisten dengan teori *stewardship*. Hal ini dapat ditimbulkan sebab adanya bentrokan motivasi antara auditor internal dengan pemimpin SKPD. Hasil ini juga tidak sesuai dengan teori kontijensi. Auditor internal berperan membantu SKPD mencapai kualitas laporan keuangan yang disyaratkan dalam PP 71 Tahun 2010. Variabel gaya kepemimpinan tidak berhasil mengkondisikan SKPD dan para pegawai yang dipimpinya untuk dapat berkolaborasi dengan inspektorat kabupaten/kota. Pemimpin SKPD belum berhasil mengakomodasi peran inspektorat pada SKPD yang dipimpinya, sehingga peran inspektorat tidak dapat dikatakan membantu SKPD dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil uji hipotesis menunjukkan interaksi SDMxLEAD berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel SDM tidak memiliki dampak signifikan pada kualitas laporan keuangan (KLK), sedangkan interaksi variabel SDM x LEAD memiliki dampak signifikan. Hal ini tampaknya dapat disebabkan oleh adanya bimbingan dan arahan atasan dalam setiap langkah kerja responden. Pemimpin membantu dan memberikan jalan keluar dan menjadikan suatu keputusan SKPD dan mau menerima dan memperhatikan masukan dan informasi dari bawahan untuk menyusun tugas kerja. Pemimpin menjadi pegawai sekaligus mentor bagi bawahannya.

Hasil penelitian dan analisis tersebut konsisten dengan teori *stewardship*. Masing-masing pegawai memiliki pendidikan yang berbeda. Peran pemimpin dalam membimbing dan mengarahkan serta membantu pegawai untuk menyelesaikan masalah menjadi signifikan dalam pelaksanaan kegiatan dan program SKPD. Berdasarkan teori kontijensi, gaya kepemimpinan adalah kontijen yang dihadapi organisasi dalam mencapai kinerja yang baik. Variabel pengkondisi, gaya kepemimpinan, berperan sebagai fasilitator dan mentor bagi SDM untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Gaya kepemimpinan berhasil mengkondisikan SDM untuk dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang diharapkan, yaitu kualitas laporan keuangan terpenuhi.

Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan politik dinasti yang berkembang di Indonesia pada pilkada 2020, terutama di eks-Karesidenan Surakarta, tidak semata-mata membawa keburukan. Aktor-aktor dinasti politik yang memenangkan pemilu tidak hanya karena memiliki keluarga di kursi pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan dan kecakapan sebagai pemimpin. Dinasti politik yang berkembang di daerah-daerah mampu menempatkan orang kompeten di bagian-bagian krusial pemerintahan sekaligus memiliki kepemimpinan yang cakap. Apabila proses akuntansi dan pelaporan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya serta didukung oleh pemimpin yang selalu memberikan arahan, kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Dengan demikian, dinasti politik mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, asalkan menempatkan orang yang tepat di tugas yang tepat "*the right man on the right place*".

Hasil uji hipotesis menunjukkan interaksi T1xLEAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel T1 memiliki dampak signifikan pada kualitas laporan keuangan (KLK), sedangkan interaksi variabel T1 x LEAD tidak memiliki dampak signifikan. Teknologi informasi yang tersedia sudah selayaknya dimanfaatkan untuk kepentingan SKPD, termasuk proses akuntansi dan pelaporan. Dalam hal ini, keputusan pemimpin dapat mempengaruhi seluruh proses, namun sulit untuk mengubah sistem yang sudah berlangsung di dalam komputer. Bimbingan dan arahan pemimpin bukanlah hal yang krusial, sebab dengan teknologi yang mudah digunakan (*user-friendly*). Ada tidaknya pemimpin bukan menjadi hal yang utama dalam pemanfaatan komputer dan jaringan.

Hasil penelitian dan analisis tersebut tidak konsisten dengan teori *stewardship*. Pemimpin dan pegawai di SKPD ialah manajer di SKPD tersebut. Pemimpin mengawasi kinerja pegawai agar dapat mencapai tujuan SKPD, sedangkan komputer dan jaringan yang tersedia di SKPD dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan pegawai di SKPD. Proses yang bersifat teknis sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori kontijensi. Pemimpin di SKPD tidak menjadi kontijen dari pemanfaatan teknologi informasi untuk memenuhi kualitas laporan keuangan

KESIMPULAN

Penelitian ini mengindikasikan di antara empat kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, terdapat satu kualitas laporan keuangan yang belum terpenuhi dalam uji validitas, yaitu relevan. SKPD yang diuji belum dapat dikatakan menggunakan informasi yang dibuat saat ini untuk mengevaluasi rencana yang telah disusun dan memprediksi rencana mendatang. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan kualitas laporan keuangan, yaitu dengan menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara jelas dan dapat dipahami. Selain itu, perlu untuk meningkatkan kualitas yang belum terpenuhi, yaitu relevan, dengan menggunakan informasi pada laporan keuangan untuk mengevaluasi rencana serta memprediksi rencana di masa mendatang.

Penerapan SAP berbasis akrual dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan efek positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Namun, peran auditor internal dan kompetensi SDM ternyata tidak sejalan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Gaya kepemimpinan bukan menjadi variabel independen dalam penelitian ini dan hanya merupakan variabel moderasi. Namun, ketika variabel LEAD diuji hipotesis terhadap kualitas laporan keuangan, variabel LEAD berpengaruh positif signifikan. Pada penelitian ini, gaya kepemimpinan hanya mampu memoderasi pengaruh positif kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Tipe moderasi gaya kepemimpinan ialah quasi moderator. Sebaliknya, gaya kepemimpinan tidak memoderasi pengaruh penggunaan SAP berbasis akrual, peran auditor internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Tipe moderasi gaya kepemimpinan ialah *predictor moderator*.

Berdasarkan teori kontijensi, gaya kepemimpinan adalah kontijen yang dihadapi organisasi dalam mencapai kinerja yang baik. Gaya kepemimpinan sebagai variabel pengkondisi mampu memoderasi pengaruh antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Pemimpin SKPD dapat melihat potensi dan kualitas dari SDM yang dimiliki suatu organisasi untuk dapat menghasikan kinerja yang tinggi. Gaya kepemimpinan berhasil mengkondisikan SDM untuk dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang diharapkan, yaitu kualitas laporan keuangan terpenuhi. Hal ini tidak terlepas dari aktor dinasti politik yang kompeten.

Para aktor dinasti politik yang berkembang di daerah-daerah mampu menempatkan orang kompeten di bagian-bagian krusial pemerintahan sekaligus memiliki kepemimpinan yang cakap. Apabila proses akuntansi dan pelaporan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya serta

didukung oleh pemimpin yang selalu memberikan arahan, kinerja akan meningkat dan kualitas laporan keuangan terpenuhi. Dengan demikian, dinasti politik mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, asalkan menempatkan orang yang tepat di tugas yang tepat.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penelitian ini mengimplikasikan penerapan SAP berbasis akrual hendaknya dapat memberikan manfaat pada proses penganggaran, tidak hanya sebagai pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Auditor internal, dalam hal ini inspektorat kabupaten, bukanlah pihak eksternal, melainkan pihak yang ikut andil dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, sehingga rekomendasi dari auditor internal selanjutnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Pelatihan bagi pegawai di bidang akuntansi, anggaran, perbendaharaan, dan aset perlu diselenggarakan untuk dapat memenuhi kualitas andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pola penempatan orang yang memiliki kepemimpinan yang cakap di posisi jabatan vital pada pemerintahan harus dipertahankan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan metode penelitian; memperbaiki pertanyaan kuesioner; menambah variabel lain; dan memodifikasi variabel yang ada pada penelitian ini.

REFERENSI

- A. Arens, A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Service (16th ed.)*. New York: Pearson.
- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1253. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p17>
- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh sistem berbasis akrual, TI, dan SPIP pada kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3475-3500.
- Allison, S. T., & Messick, D. M. (2014). *Conceptions of leadership: Enduring ideas and emerging insights*. Springer.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia
- Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. (2018). Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 30-42.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Aswar, K. (2020). Assessing the impact of influencing factors on the quality of local government financial statements. *Journal of Economics Finance and Accounting*, 7(1), 1-8.
- Basalamah, A. S. (2020). *Dari Pejabat Menjadi Pemimpin (2nd ed.)*. Depok, Indonesia: Swa dakyah.
- BPK RI. (2020). *Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019* (Issue 0921).
- Clegg, S. R., Pitsis, T. S., & Mount, M. (2021). *Managing and organizations: An introduction to theory and practice*. Sage.
- Darmansyah, R., Syahrani, S., & MS, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issue*, 2(1), 34-46. doi:<https://doi.org/10.33019/jpi.v>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal : Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233-247.
- Gamayuni, R. R. (2018). The effect of internal audit function effectiveness and implementation of accrual based government accounting standard on financial reporting quality. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 46-58.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.

- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *SAWALA, Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177-191.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, XXXI(1), 2- 24. doi:10.1108/EBR-11-2018-0203
- Hair, J. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis (8th ed.)*. Andover, Hampshire, United Kingdom: Cengage Learning EMEA.
- Humboldt, S. v. (2016). Conceptual and Methodological Issues on the Adjustment to Aging : Perspectives on Aging Well. (J. L. Powell, & S. Chen, Penyunt.) Lisbon, Portugal: Springer Netherlands. doi:10.10007/978-94-017-7576-2
- Jupp, V. (2006). *The SAGE Dictionary of Social Research Methods*. SAGE Publications. Diambil kembali dari https://www.google.co.id/books/edition/The_SAGE_Dictionary_of_Social_Research_M/IdqQAwwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Kabib, N., Hayati, S. N., & Fatimatu Zahra, S. (2021). Apakah Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumberdaya Manusia serta Peran Auditor Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan?. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02):473-481.
- Kandula, S. R. (2013). *Competency-based Human Resource Management*. India: PHI Learning. Diambil kembali dari https://www.google.co.id/books/edition/COMPETENCY_BASED_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT/YCy2FdxvbeMC?hl=en&gbpv=0
- Kwong, K., & Wong, K. (2019). *Mastering Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS in 38 Hours*. Bloomington: iUniverse.
- Lestari, A., Hariyono, & Abdullah, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. *Jurnal Widya Ganecwara*, 11(1), 1–20.
- Lewis-Beck, M., Bryman, E. P., Bryman, A. E., & Liao, T. F. (2004). *The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods (Vol. 1)*. California : SAGE Publications.
- M. Lottridge, S., Schulz, E. M., & Mitzel, H. C. (2013). *Handbook of Automated Essay Evaluation : Current Applications and New Directions*. (J. Burstein, & M. D. Shermis, Penyunt.) UK: Taylor & Francis. Diambil kembali dari https://www.google.co.id/books/edition/Handbook_of_Automated_Essay_Evaluation/SvNnPeYAUPcC?hl=en&gbpv=1
- Nagara Institute. (2021). Riset politik dinasti.
- Muchson, M (2017). *Statistik Deskriptif*. Spasi Media.
- Nugraheni, B. S., & Mustikawati, R. I. (2016). Peran Audit Internal sebagai alat bantu manajemen untuk menunjang keefektifan pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BRI (Persero) TBK. Kantor Cabang Wates. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).
- Pelamonia, J. T. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Etepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Di Pemerintah Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 39-52.
- Prabowo, H. (2020). Sirkulasi Elite Pilkada 2020: Cara Instan Wariskan Kekuasaan - Tirto.ID. <https://tirto.id/sirkulasi-elite-pilkada-2020-cara-instan-wariskan-kekuasaan-fSk7>
- Pratiwi, N. W., Suseno, Y. D., & Untung Sriwidodo. (2020). Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14, 24–34
- Pratolo, S., & Irmawati, F. D. (2020). Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah di Indonesia. *E-JAe-Jurnal Akuntansi-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 800–814
- Prianto, B. (2016). Partai Ppolitik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Desentralisasi. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(2), 105-117.

- Prihatini, S. (2017). Analisis ekonomi wilayah kabupaten di eks- karesidenan surakarta (boyolali, sukoharjo, karanganyar, wonogiri, sragen dan klaten) tahun 2010-2014. *Publikasi Ilmiah Fakultas Geografi UMS*.
- Priyetno, A. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Pertimbangan Etika Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris SKPD Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1.
- Purba, David Oliver. (2020). 5 Nama Anggota Keluarga Tokoh Negeri yang Maju Pilkada 2020, Ada Anak Jokowi hingga Putra Amien Rais. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/01/06000021/5-nama-anggota-keluarga-tokoh-negeri-yang-maju-pilkada-2020-ada-anak-jokowi?page=all>
- Putranto, A. E. (2013). Peran BKAD Subosukawonosraten dalam Kerjasama Antar Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(2), 111. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6515>
- Qomah, Siti dan Ismunawan. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95-108.
- Nizomi, K. (2019). Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Organisasi (Studi Kasus Kepala Perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Depok Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(2), 128–150.
- Pamungkas, C. P. (2018). Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3), 221–230.
- Rahmatunnisa, M. (2021). Menyoal Politik Kekerabatan Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 295–316. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.483>
- Riharjo, Budi & Anggraini, N. (2017). Pengaruh politik dinasti terhadap akuntabilitas pemerintahan dengan pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–23.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi edisi ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Routledge. (2017). *Governance and Governmentality for Projects : Enablers, Practices, and Consequences*. Dalam R. Muller (Penyunt.). New York: Taylor & Francise.
- Saunders, M. (2012). *The Practice of Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current Challenges*. London: Sage.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research Methods for Business Students*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Sudrianti, Ni Made. 2015, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *Artikel*. Universitas Udayana, Bali.
- Sukarman, S., & Solovida, G. T. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada SKPD Kabupaten Tegal). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 36-43.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 13, No. 2.
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(2), 169-190.

- Triseptya, G. N., Pagalung, G., & Indrijawati, A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Moderasi. *Journal Of Management & Bussines*, 1(1), 34–45.
- Torar, R. (2018). Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal. Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Wardhani, R. S., & Suhdi. (2020). *TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI. Indonesia*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. Diambil kembali dari https://www.google.co.id/books/edition/TATA_KELOLA_PERGURUAN_TINGGI/GnfhDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Widyaningsih, A. (2011). Moderasi Gaya Kepemimpinan atas Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack. *Fokus Ekonomi*, 6(1), 1–18.
- Wineh, S., Ferdian, T., & Novianti (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, Jambi). *Dinamika: Jurnal Manajemen Akuntansi, Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(1), 63-84.
- Yanuarti, E., & W, A. S. (2014). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Guru. *JBTI*, V(2).
- Yukl, G. A., & Gardner, W. L. (1971). *Leadership in Organization (9th ed.)*. New York, Boston: Pearson.
- Yusrianti, Sutisman, E., Ermawati, Y., Rumasukun, R., & Prasetianingrum, S. (2021). Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. *The Journal of Business and Management Research*, 4(1),1-12.
- Zulkarnain, Z., & Ningrum, D. A. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197-211.